

ABSTRAK

Aldissa Riani, 1218010007, 2025, Implementasi Kebijakan Jabar Saber Hoaks di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dan pengguna internet terbanyak di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk dan pengguna internet memungkinkan berkembangnya berita dengan cepat di masyarakat. Berita tersebut tidak hanya memberikan berita yang akurat dan asli, tetapi terkadang berita palsu dapat menyebar dengan cepat dan dengan mudah dipercaya yang dapat menyebabkan kesalahan informasi dan perpecah behalan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menanggulangi penyebaran berita palsu di Jawa Barat yaitu Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks atau Jabar Saber Hoaks. Jabar Saber Hoaks memiliki peran penting dalam proses verifikasi dan klarifikasi berita palsu yang dilaporkan oleh masyarakat Jawa Barat. Namun, implementasi kebijakan terkait pemberantasan berita palsu perlu dikaji lebih mendalam guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan dan dapat menjawab persoalan berita palsu yang tersebar di Tengah masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan di Jabar Saber Hoaks dalam menangani penyebaran berita palsu di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) sebagai pisau analisis yang dapat menilai keberhasilan implementasi kebijakan dengan empat aspek utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, yang dilaksanakan di kantor Jabar Saber Hoaks dan dokumentasi.

Implementasi kebijakan Jabar Saber Hoaks telah berjalan cukup baik berdasarkan empat aspek implementasi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari komitmen pelaksana yang tinggi, struktur birokrasi yang tertata melalui SOP (*Standard Operating Procedure*), serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi. Efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, sosialisasi yang belum merata, dan koordinasi lintas sektor yang belum maksimal. Diperlukan penguatan pada aspek pemerataan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antar lembaga agar implementasi kebijakan berjalan lebih konsisten di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kata kunci : Implementasi, Berita Palsu, Jabar Saber Hoaks, Provinsi Jawa Barat

ABSTRACT

Aldissa Riani, 1218010007, 2025, Implementation of the Jabar Saber Hoaks Policy at the Department of Communication and Informatics of West Java Province

West Java is one of the provinces with the largest population and the highest number of internet users in Indonesia. The high number of residents and internet users accelerates the spread of information in society. However, not all information circulating is accurate or factual; false news can spread rapidly and be easily believed, potentially leading to misinformation and national disunity. In response, the Department of Communication and Informatics of West Java Province established a special task force called Jabar Saber Hoaks (Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks) to tackle the spread of hoaxes. This task force plays a vital role in verifying and clarifying false information reported by the public. However, the implementation of this policy requires deeper examination to assess its effectiveness in addressing the proliferation of fake news in the community.

This study aims to evaluate the success of the Jabar Saber Hoaks policy implementation in combating fake news at the Department of Communication and Informatics of West Java Province. The research uses George C. Edwards III's (1980) policy implementation theory as the analytical framework, which assesses policy success through four key aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study adopts a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques include interviews, observations conducted at the Jabar Saber Hoaks office, and documentation.

The implementation of the Jabar Saber Hoaks policy has been carried out fairly well across the four aspects of policy implementation, though it has not yet reached full optimization. This is reflected in the strong commitment of implementers, a well-structured bureaucracy with Standard Operating Procedures (SOP), and the use of various communication channels. However, the policy's effectiveness is still hindered by limited human resources, uneven public outreach, and suboptimal cross-sector coordination. Strengthening efforts are needed in the areas of information dissemination, capacity building for human resources, and inter-agency collaboration to ensure consistent policy implementation across all regions of West Java.

Keywords: *Implementation, Fake News, Jabar Saber Hoaks, West Java Province*